

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN NGAWI

Oleh : Sumiati & Aris Tri Haryanto

ABSTRACT

Sumiati, & Aris Tri Haryanto, 2016, Management Of Parking Charges In Increasing Revenue At The Transportation Department Of Communication And Informatics In The District Ngawi, Graduate Program University Master Of Public Administration Slamet Riyadi Surakarta.

One levies selected by the District Government ngawi in tapping the financial resources of the area is through the withdrawal of parking fees at the edge of the public road, which is set in Ngawi District Regulation No. 3 of 2007 on Bank Service Fees Parking Public Road. With the regulation of this area, is expected to improve the effectiveness of regional revenue source in Ngawi. This research conducted in order to determine the management of parking retribution in Ngawi conducted by the Department of Transportation, Communication, and Information Ngawi, as well as see the optimization of the parking fee collection. This type of research that be used is the descriptive type that is a type of research that aims to outline systematic, factual and accurate information on the existing data in the field of levies, focused on the management of existing parking charges in Ngawi. The data collection was done by interview and documentation study. Analysis of data using interactive analysis method according to Miles and Huberman. Based on the results of research conducted, it can be seen that the process of managing parking fees were managed by the Department of Transportation, Communication, and Information Ngawi, from payments made by users of services to parking attendants, payment of parking attendants to the concierge collector, reception bendaraha then deposit on District government to be referred to as Regional Revenue Ngawi sector, especially the parking levy.

Keywords: Planning, Organizing, Implementation, Monitoring

1. Pendahuluan

Otonomi daerah, menghendaki agar daerah berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat diandalkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, 174 salah satu sumber penerimaan terbesar daerah ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari beberapa sumber penerimaan tersebut, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi cukup tinggi dan dapat dikembangkan ialah pendapatan dari sektor retribusi daerah.

Sedangkan, salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ialah retribusi parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Di Kabupaten Ngawi, perpariran juga menjadi salah satu alternatif pemerintah daerah dalam menggali sumber keuangan daerah dengan melalui kebijakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Hal ini ditandai dengan diberkakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dari sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Kabupaten Ngawi tentu harus bekerja keras dalam upaya penggalan terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi parkir, agar dapat dikelola dengan maksimal sehingga kedepannya mampu mencukupi semua kebutuhan rumah tangganya sendiri. Tetapi, tidak dapat dipungkiri juga bahwa sistem pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi ternyata mengalami hambatan. Hal ini dapat dilihat dari komposisi target dan realisasi penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 5 tahun terakhir ini, yaitu :

Tabel 1
Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Ngawi
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1.	2011	Rp. 3.063.500.500,00	Rp.2.974.771.875,00	99,75
2.	2012	Rp. 3.678.292.500,00	Rp.3.694.486.150,00	100,44%
3.	2013	Rp. 4.369.300.500,00	Rp.4.585.913.751,00	104,96%
4.	2014	Rp. 5.550.531.000,00	Rp.5.617.631.630,00	101,21%
5.	2015	Rp. 7.644.300.600,00	Rp.6.780.341.550,00	88,69%

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Ngawi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 dan 2015 penerimaan retribusi parkir belum dapat memenuhi target yang diinginkan. Beberapa kendala yang ditemukan diantaranya ialah: masih banyaknya kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar dan menjadi target, penghasilan parkir tidak diberikan seluruhnya kepada petugas pemerintah kabupaten dan petugas hanya memberikan karcis yang belum

tentu dihabiskan oleh juru parkir. Studi yang dilakukan Sharaf A. Alkheder, Murad M. Al Rajab, Khalid Alzoub, (2016) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mobile dalam parkir akan membantu dalam mengurangi waktu yang terbuang dalam mencari tempat parkir dan akan meningkatkan efficiency sistem parkir di Abu Dhabi. studi yang sama dilakukan oleh Dmitriy Fadeyev (2016) menunjukkan bahwa Efisiensi manajemen parkir sangat ditentukan oleh tingkat optimalisasi dan biaya cara mencari tempat parkir. Demikian juga Chao Lei, Yanfeng Ouyang (2017) mengemukakan bahwa Penggunaan model ADP (approximate dynamic programming) secara konsisten dapat mencapai kinerja yang lebih besar dari sistem parkir, dan menunjukkan kehandalan dalam menangani permintaan parkir dengan variasi ruang dan waktu.

Tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan pengelolaan redistribusi parkir di Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ngawi.

2. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen, seperti yang dijelaskan oleh Koontz yang dikutip oleh Susilo Martoyo (2008 : 2) yang menyatakan bahwa *“Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals, working together in groups, efficiently accomplish selected aims”*. Sedangkan menurut Musselman yang dikutip oleh Susilo Martoyo (2008 : 3) menjelaskan bahwa *“Management is the process of planning, Organizing, directing and controlling the activities of an enterprise to achieve specific objectives”*.

Menurut James AF Stoner yang dikutip oleh Susilo Martoyo (2008 : 3) menyatakan bahwa *“Manajemen is the process of planning, organizing, leading and controlling the effect of organization members and the use of other organizational members and use of other organizational goal*. Arti: Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan mencapai tujuan organisasi tujuan organisasi yang telah di tetapkan.” Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen mengandung unsur sebagai proses, sebagai seni, terdiri dari individu-individu/orang-orang yang melakukan aktivitas, menggunakan berbagai sumber-sumber dan faktor produksi yang tersedia dengan cara efektif dan efisien, dan adanya tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian, maka manajemen dianggap suatu proses, karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

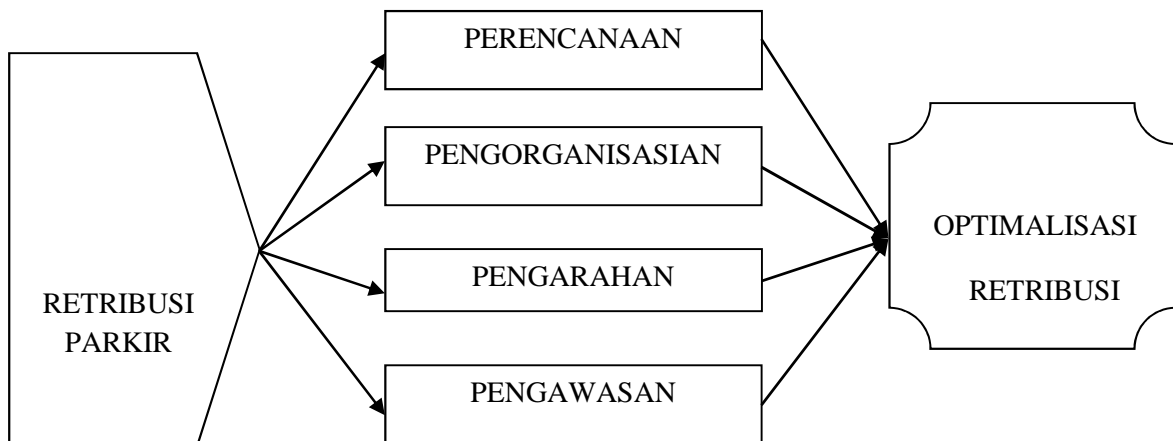
pengawasan. Dengan kata lain, satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait (terpadu), sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Susilo Martoyo, 2008 : 7).

Kemudian mengenai pengelolaan, secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003 : 119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelolah” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Ahmad Yani (2009 : 89) menjelaskan bahwa “Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan”. Mengenai hal ini, Ahmad Yani pada dasarnya menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, Nanang Fattah (2004 : 1) pun juga berpendapat yang sama mengenai pengelolaan, bahwa dalam proses pengelolan sama dengan proses manajemen yang melibatkan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam gambar/bagan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Dasar Pemikiran



3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Informan dipilih secara *purposive* (*purposive sampling*), adapun informan tersebut adalah petugas parkir, kepala dinas perhubungan dan informatika, petugas dinas perhubungan dan informatika, dan masyarakat pengguna parkir. Penelitian ini dianalisis dengan analisis interaktif .

4. Hasil Penelitian

Pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ngawi, senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Akan tetapi, realita menunjukkan bahwa pada proses pengelolaan retribusi parkir masih menemui beberapa kendala dalam pengelolaannya, yaitu mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasannya.

Pada tahap perencanaan, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ngawi mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan target penerimaan jasa retribusi parkir. Pada dasarnya, dalam hal penentuan target senantiasa mengacu pada jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan Ngawi. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Pada data realisasi retribusi parkir pada tahun 2015, terlihat bahwa target yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ngawi tidak tercapai karena bertambah kawasan perparkiran yang tidak masuk dalam pendataan di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Kabupaten Ngawi. Dampaknya ialah hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran yang tidak memiliki legalitas tentu saja tidak akan diserahkan kepada pihak dinas, sehingga hal ini jelas akan mengurangi penerimaan retribusi jasa parkir di Kabupaten Ngawi yang seharusnya masih dapat bertambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ngawi perlu meningkatkan sistem pendataan agar supaya kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga akan menambah penerimaan retribusi parkir dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah dianggarkan. Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 1, bahwa lokasi pemungutan retribusi parkir adalah di tepi jalan umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan mempunyai potensi sebagai sarana parkir yang strategis untuk dipergunakan sebagai lokasi pemberian pelayanan parkir. Dengan demikian, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ngawi harus melakukan penambahan dan perluasan terhadap areal/kawasan/titik lokasi perparkiran. Diharapkan dengan hal itu dapat memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi penerimaan retribusi parkir tahun lalu dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai.

Pada tahap pengorganisasian, diketahui bahwa jumlah kolektor yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan perparkiran tidak seimbang dengan wajib retribusi yaitu juru parkir yang berjumlah 1.126 orang. Dengan demikian pemungutan retribusi parkir seyogyanya belum berjalan proporsional, efektif dan efisien. Selain itu, tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir juga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng, sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif. Ada juga kendala lain yang sering juga terjadi dilapngan yaitu tindakan kolektor dan juru parkir yang indisipliner yaitu terlambat melakukan penyeteran, sehingga di dalam hal penyeteran tidak sesuai standart kerja yang ditentukan.

Pada tahap pengarahan, dilakukan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ngawi kepada para kolektor hanya dilakukan sebulan sekali. Pengarahan yang dilakukan, diantara ialah pemgeragan tentang kondisi letak parkir agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan jalan yang melebihi batas parkir yang biasanya menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Selain itu, Pengarahan yang dilakukan terkait penertiban juru parkir liar yang meraup keuntungan dan sangat merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi,

dan Informatika Kabupaten Ngawi tentunya harus menertibkan pula titik parkir yang tidak memiliki legalitas, sehingga para juru parkir liar tidak dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar.

Pada tahap pengawasan, dilakukan dalam 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir. Hal ini dilakukan untuk mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ngawi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap letak titik parkir yang tidak melampaui batas dan jika melampaui batas dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak hanya itu, pengawasan ternyata juga dilakukan untuk tempat-tempat yang tidak terdaftar sebagai titik parkir di wilayah Ngawi, namun dijadikan sebagai tempat untuk meraub keuntungan bagi juru parkir liar yang menggunakan kesempatan tersebut untuk memungut retribusi. Kemudian, pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengandalkan laporan-laporan semata dan hanya terfokus terhadap pengawasan laporan keuangan yang telah masuk.

5. Penutup

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi, sudah cukup baik tetapi belum optimal. Dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir.

6. Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Organisasi*, Cakrawala, Jogjakarta.
- Mamesah, D.J. 2005. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Manullang. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Marhayadi, Putut. 2002. *Paduan Lengkap Otonomi Daerah*. ISMEE. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Martoyo, Susilo. 2008. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, BPFE, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Mandar Maju. Bandung.
- Sulaiman, Anwar. 200. *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*. STIA-LAN Press, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*.

Jurnal

Dmitriy Fadeyev, Method for Evaluating Economic Efficiency of Parking Management Tools, 12th International Conference "Organization and Traffic Safety Management in large cities", SPbOTSIC-2016, 28-30 September 2016, St. Petersburg, Russia, Transportation Research Procedia 20 (2017) 193 – 199

Chao Lei, Yanfeng Ouyang, **Dynamic pricing and reservation for intelligent urban parking management**, Transportation Research Part C : Emerging Technologies, Vol 77 April 2017 page 226-224

Sharaf A. Alkheder, Murad M. Al Rajab, Khalid Alzoub, Parking problems in Abu Dhabi, UAE toward an intelligent parking management system “ADIP:Abu Dhabi Intelligent Parking, Alexandria Engineering Journal, (2016)